

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

COVID-19 adalah pandemi global yang menimbulkan krisis serius bagi kehidupan dan kesehatan manusia (Xue et al., 2021). COVID-19 juga membawa dampak buruk bagi aspek sosial dan ekonomi (Asante & Mills, 2020). Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara kebijakan ekonomi, kesehatan dan perlindungan sosial (Pereirinha & Pereira, 2021). Proses koordinasi kebijakan berpotensi menimbulkan masalah khususnya berkaitan dengan konseptualisasi dan penyusunan kebijakan (Capano et al., 2020). Secara ideal dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakter plasticity (ekstraversi, keterbukaan) tinggi untuk menciptakan kebijakan di negara yang sedang terdampak krisis (Medeiros et al., 2022).

Dalam pengambilan kebijakan Xi Jinping sukses menghadapi COVID-19 di Cina melalui speech act yang membingkai health security mengenai COVID-19 menjadi ancaman yang berbahaya, hal tersebut membuat masyarakat Cina semakin patuh dengan kebijakan COVID-19 yang diterapkan menurut (Sari, 2020). Tidak beda jauh dengan Cina, Vietnam juga sukses membuat COVID-19 menjadi musuh masyarakat (Ivic, 2020) Jarak sosial dan mencuci tangan digambarkan sebagai masalah patriotisme, dan pesan ini juga dikomunikasikan melalui kampanye seni dan informasi (Le Thu, 2020). Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, menggambarkan pandemi sebagai pertempuran dan meminta warga untuk bersatu (Le Thu, 2020). Ini membuat Vietnam berhasil menghadapi COVID-19 melalui kepemimpinan yang menggunakan retorika “perang melawan COVID-19” sehingga membuat warga untuk bersatu untuk mengikuti berbagai kebijakan yang diterapkan (Ivic, 2020)

Dalam konteks Malaysia kebijakan COVID-19 dikeluarkan dan diganti secara bertahap. Pada 18 Maret 2020, Kemenkes Malaysia menerapkan MCO (Movement Control Order) atau PKP (Perintah Kawalan Pergerakan) kebijakan

tersebut membatasi pergerakan orang masuk atau keluar suatu daerah (Shah et al., 2020). Namun kebijakan tersebut menempatkan sektor ekonomi negara dalam keadaan bahaya, hal tersebut dijelaskan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahwa industri pariwisata negara telah lumpuh, dengan perkiraan kerugian sebesar RM 3,37 miliar dalam 2 bulan pertama tahun 2020 (Dzulkify, 2020). Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2020 Tan Sri mengganti PKP dengan PKPB (Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat) dengan tujuan membuka kegiatan ekonomi negara meski tetap dalam kontrol yang ketat (Ladiqi, 2020). PKPB terbukti sukses dengan adanya kebijakan pengganti yang diterapkan pada PKPP (Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan) yang melonggarkan rakyat Malaysia beraktivitas (Ladiqi, 2020). Disisi lain keterbukaan ditunjukkan oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi, dengan kebijakan politik partisipatoris-responsif yang melibatkan banyak partipasi public dalam kebijakannya (Hastangka & Farid, 2020). Menurut-nya bentuk dari politik partisipatoris-responsif tersebut adalah ketika Presiden Jokowi mengeluarkan KEPPRES No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk menghadapi pandemi dan melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19.

Narasi pandemi berjalan melintasi ruang publik dibentuk oleh fakta keamanan dan wacana sebuah kekuasaan (Davis, 2017). Dalam hal ini kebijakan-kebijakan mengenai COVID-19 dapat digambarkan melalui pemberitaan media. Pemberitaan dalam portal media Tempo.co, yang membingkai secara pesimis mengenai kebijakan pemerintah, sosok Jokowi digambarkan sebagai pemimpin yang santai dalam maintenance COVID-19 (Sofian & Lestari, 2021). Dua media besar lain di Indonesia yaitu Kompas.com dan Detik.com memiliki tensi kekawatiran yang dominan dalam pemberitaan mengenai isu COVID-19 dimana kedua media tersebut meninformasikan mengenai meningkatnya jumlah positif COVID-19, kurangnya alat bagi tenaga medis, COVID-19 yang mengancam ekonomi Indonesia, sampai diterbitkan atau tidaknya kebijakan COVID-19 (Fahrimal et al., 2020).

Dengan demikian pemberitaan mengenai kebijakan tentang COVID-19 akan turut serta membangun persepsi masyarakat di masa-masa darurat pandemi COVID-19. Pada awal kepemimpinannya Sianipar (2015) menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang populis karena peduli dengan rakyat kecil, hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mensubsidi dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sebagai salah satu pemimpin populis kebijakan Presiden Jokowi juga menjadi perhatian secara internasional dan regional terkait pendekatan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Pemberitaan internasional terkait isu penanggulangan COVID-19 di Indonesia dapat tergambarkan dalam berbagai pemberitaan dan liputan media berbahasa Inggris di Indonesia. Beberapa media Indonesia yang fokus dalam pemberitaan internasional seperti Independent Observe, Jakarta Globe, dan The Jakarta Post dapat menjadi sumber informasi yang menggambarkan realitas proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Namun dari berbagai surat kabar berbahasa Inggris, The Jakarta Post menjadi pionir yang menerbitkan artikel berbahasa Inggris untuk publikasi internasional. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat framing pemberitaan kebijakan populisme Presiden Joko Widodo dalam pemberitaan terkait penanggulangan COVID-19 di Indonesia tahun 2020 – 2021 dalam The Jakarta Post.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan populis Presiden Jokowi dalam menghadapi COVID-19 untuk melihat bagaimana media membingkai kebijakan, sehingga membedah kerangka populis dalam kebijakan. Peneliti membatasi portal media online yang diteliti yaitu The Jakarta Post.

## 1.3 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan, berikut merupakan identifikasi masalah yang diteliti: Bagaimana Framing Kebijakan Populisme COVID-19 Jokowi Dalam Pemberitaan *The Jakarta Post* pada periode 1 Maret 2020 -10 Oktober 2021

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana portal media online The Jakarta Post dari periode periode priode 1 Maret 2020 hingga 10 Oktober 2021 membongkai kebijakan populis COVID-19 Jokowi, sehingga membedah kerangka populis dan netralnya artikel berita dalam menginformasikan kebijakan.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

##### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini melihat bagaimana portal berita media online membongkai kebijakan populis COVID-19 Jokowi. Sehingga membedah kebijakan bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memberikan sumbangan terhadap jurnalisme media politik untuk menjaga kenetralan pelaku media dalam penulisan berita.

##### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi penelitian selanjutnya. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah dikonstruksi oleh media, karena sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden akan berpengaruh pada kehidupan rakyatnya. Sehingga media diharapkan dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat.

#### 1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan cara menganalisa portal berita online The Jakarta Post.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitia

No	Tahapan Penelitian	Oktober 2022				November 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari tema dan objek penelitian								
2	Mengumpulkan kajian dan penelitian terdahulu								
3	Mengerjakan Bab 1 Pendahuluan								
4	Mengerjakan Bab 2 Tinjauan Pustaka								
5	Mengerjakan Bab 3 Metode Penelitian								

Sumber: oalahan peneliti, 2022